



BPSDMD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA

TAHUN

2025

BPSDMD

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkenan-Nya penyusunan **RENJA BPSDM Daerah Provinsi NTB** Tahun 2025 dapat diselesaikan.

RENJA BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai gambaran dari serangkaian rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan selama Tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah dan Renstra BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

Semoga RENJA BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan media koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kerja di masa yang akan datang.

Dan tidak lupa perkenankanlah pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya serta terimakasih yang tulus kepada pihak – pihak yang sudah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan RENJA BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, September 2024

Kepala BPSDMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. ASHARI, SH.,MH.
NIP. 19661231 198603 1 105

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisa Kinerja Layanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPSDMD Provinsi NTB	54
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

T.2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB Tahun 2024	10
T.2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	24
T.2.5.1	Tabel Usulan SOTK BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	51
T.3.2.1	Tujuan dan Sasaran BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025	55
T.4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun Renja Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai penjabaran terhadap Perencanaan Strategis (Renstra Perangkat Daerah) ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dan Renstra karena, dalam hal ini keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja-PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan Dokumen Daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra-PD dan RKPD. Renja-PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RPD, Renstra -PD, dan bagi RKA-PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Penyusunan Renja BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 dan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPSDM Daerah Provinsi NTB, evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra pada BPSDM Daerah Provinsi NTB. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA BPSDM Daerah Provinsi NTB. Selain itu Renja diharapkan menjadi awal pelaksanaan penyusunan anggaran program / kegiatan pada BPSDM Daerah Provinsi NTB yang telah disesuaikan dengan ketentuan percepatan target serta menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan optimalisasi sumber daya manusia serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dan tata kerja yang baik serta tepat, diharapkan pelaksanaan setiap

perencanaan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 ini dapat berhasil dan berjalan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
16. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025, dimaksudkan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Lebih lanjut lagi penyusunan Rencana Kerja BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagai acuan pedoman dalam rangka merumuskan Program Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta upaya mengimplementasikan Rencana Strategis BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 tersebut antara lain :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPSDM Daerah Provinsi NTB secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Bab. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.

Bab. IV. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab. V. Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instalasi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai dengan target kinerja dalam Renja BPSDM Daerah Provinsi Tahun 2025 didasarkan pada Renstra BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan;
3. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan. Program Kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program Kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dari BPSDMD Provinsi NTB.

Dalam penyusunan Renja BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 diperlukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-1) Tahun 2024, perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan Tahun 2024. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun (n-2) 2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun (n-1) 2024 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2025. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran Tahun berikutnya, maka perlu

adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun (n-1) tahun 2024

Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 pada tabel T.2.1.1

T.2.1.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI NTB
RENJA PERANGKAT DAERAH BPSDM DAERAH
TAHUN (n-1) 2024 S/D TRW II

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA OPD/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PADA TAHUN 2026		RENJA TAHUN 2024		PENETAPAN APBD/DPA		REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2024		% REALISASI SAMPAI BULAN JUNI 2024
					TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI KEU (Rp)	% REALISASI KINERJA
Terwujudnya ASN NTB yang memiliki Kompetensi		BPSDM Daerah Provinsi NTB	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi			20,705,456,680		21.974.126.366		20,936,103,339		10,089,684,529	

	Tingkat Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Daerah Provinsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD		A	17,418,992,089	BB	20.294.126.366	BB	19,066,103,339	-	9,538,083,089	0
	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Retribusi dan LLPAD pada BPSDMD Provinsi NTB		Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi	%	>15		7		7		3.98		57
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Dokumen	36	263,000,000	36	692,229,350	36	380,229,350	12	201,516,550	33
	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	122,000,000	2	305,649,450	2	130,649,450	2	91,563,000	100
	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	55,000,000	1	54,891,950	1	54,891,950	0	36,729,950	0

	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	54,000,000	1	38,294,000	1	38,294,000	0	8,400,000	0
	Tersusunnya laporan capaian dan koordinasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	26	11,000,000	26	31,169,000	26	31,169,000	8	7,050,000	31
	Tersusunnya laporan evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	21,000,000	6	262,224,950	6	125,224,950	2	57,773,600	33
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	Dok	31	13,789,000,000	31	14,938,003,167	31	14,752,894,415	9	8,163,220,644	29
				org	115		115		88		88		100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115	13,604,000,000	115	14,728,199,167	88	14,543,090,415	88	8,070,546,833	100

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	135,000,000	12	163,925,000	12	163,925,000	4	54,572,811	33
	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Keuangan PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30,000,000	1	20,695,000	1	20,695,000	1	19,820,000	100
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/TRW/S emesteran PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	20,000,000	18	25,184,000	18	25,184,000	4	18,281,000	22
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	4	45,000,000	4	47.911.375	4	47,911,375	-	13,360,000	0
	Meningkatnya kualitas Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	45,000,000	4	47.911.375	4	47,911,375	0	13,360,000	0
	Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125,000,000	0	-	-	-	0	-	0

	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	125,000,000	0	0	0	-	0	-	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah	Paket	83	408,000,000	83	427,882,365	83	389,806,365	83	154,383,444	100
				dok/laporan	54		54		54		17		31
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketersediaan instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	80,000,000	10	86,089,225	10	71,639,225	10	9,217,900	100
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	70	75,000,000	70	62,883,140	70	48,257,140	70	14,053,680	100
	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	576,000	100
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	2	17,000,000	2	8,000,000	2	1,750,000	100

	Meningkatnya Informasi Bagi ASN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	14,000,000	2	15,660,000	2	15,660,000	2	6,640,000	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	220,000,000	52	242,250,000	52	242,250,000	15	122,145,864	29
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	107	168,310,965	30	600,752,900	20	408,382,700	-	-	0
	Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Jabatan;	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-	0	560,000	0	560,000	0	-	0
	Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	68,310,965	0	-	0	-	0	-	0
	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Mesin PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100,000,000	30	600,192,900	20	407,822,700		-	0

	Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		0	-	0	-		-	0
	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1,927,581,124	100	2,242,197,209	100	2,083,130,834		954,017,198	0
	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2,700,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	-	100
	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	348,677,324	12	664,493,409	12	514,722,034	3	260,446,198	25
	Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,576,203,800	12	1,576,203,800	12	1,566,908,800	3	693,571,000	25
	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	490	693,100,000	397	1,345,150,000	397	1,003,748,300	31	51,585,253	8

	Meningkatnya Kualitas Kendaraan Perorangan/ Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	21	153,100,000	21	160,720,000	21	160,720,000	21	29,957,083	100
	Meningkatnya Kualitas kendaraan dinas operasional/lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	13,578,170	100
	Meningkatnya kualitas peralatan dan mesin PD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	448	150,000,000	369	112,430,000	369	56,830,000	5	8,050,000	1
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	300,000,000	2	982,000,000	2	696,198,300	0	-	0
	Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi Manajerial	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Poin	0.32	3,286,464,591	10	1.680.000.000	10	1,870,000,000	11	551,601,440	110
	Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi Fungsional		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional				2		2		6		300

	Meningkatnya ASN yang bersertifikat kompetensi teknis		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis				17		17		5		29
	Meningkatnya ASN yang Tersertifikasi		Persentase Pejabat Fungsional yang tersertifikasi	Persen	0.32		0.32		0.32		0		0
	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Kompetensi Tekhnis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	orang	540		120		120		5,089		4241
			Jumlah dokumen pengembangan kompetensi teknis	dokumen	7	452,880,000	5	285.000.000	5	285,000,000	2	91,985,140	40
	Tersusunnya kebijakan teknis, pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	45,000,000	2	75.000.000	2	75,000,000	1	28,678,420	50

	Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi teknis	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	2	41,000,000	2	44.500.000	2	44,500,000	1	16,072,920	50
	Terselenggarannya pengembangan kompetensi teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	540	366,880,000	120	130.500.000	120	130,500,000	5,089	35,666,700	4241
	Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen	3	25,000,000	1	35.000.000	1	35,000,000	0	11,567,100	0
	Meningkatnya kualitas pengembangan kelembagaan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	245	2,833,584,591	20	1.395.000.000	20	1,585,000,000	-	459,616,300	0

	sumber belajar dan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi	Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	Orang	1,583		588		40		-		0
			Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Dokumen	46		32		33		9		27
	Tersusunnya kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pembang Kompetensi.	Dokumen	2	25,000,000	2	180.000.000	3	180,000,000	1	130,374,280	33
	Tersusunnya dokumen pengelola LSP-PDN	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	3	55,000,000	3	35.000.000	3	35,000,000	1	10,380,000	33
	Terlaksanannya sertifikasi kompetensi ASN	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang	245	122,613,746	20	35.000.000	20	35,000,000	0	5,140,000	0

	Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan dan sumber belajar	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	300,000,000	3	307.500.000	3	427,500,000	1	271,138,700	33
	Tersusunnya dokumen kerjasama antar lembaga	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	33	70,000,000	18	75.000.000	18	145,000,000	5	28,528,620	28
	Tersusunnya standar perangkat pembelajaran pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	2	25,000,000	2	20.000.000	2	20,000,000	0	2,299,400	0
	Terselenggaranya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Orang	1,583	2,150,970,845	588	707.500.000	40	707,500,000	0	2,500,000	0

	Tersusunnya dokumen evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.	Dokumen	3	85,000,000	4	35.000.000	4	35,000,000	1	9,255,300	25
--	--	--	---	---------	---	------------	---	------------	---	------------	---	-----------	----

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (Tahun 2023)

Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 pada tabel T.2.1.2

T.2.1.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI NTB
RENSTRA PERANGKAT DAERAH BPSDM DAERAH PROVINSI NTB
TAHUN 2023

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9=8/7X100		10=7+8		15=13/5*100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.04.0.00.0.00.01.00 00 BPSDM Daerah Provinsi NTB.				100,320,001,44 2.36		22,145,456,68 0.00		19,306,409,130. 00						
	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan umum perangkat daerah	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	%	100	48,664,761,401 .93	100	19,097,058,38 0	100	16,873,581,702	100	88	10	46,771,140,069	9.5	96.11
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	90	80,169,000.00	62	612,960,600.0 0	39	416,037,117.00	63	68	100	646,148,417.00	111. 1	805.98
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5.04.01.1.01.01 Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	8	18,234,400.00	4	308,565,000	4	241,820,000.00	100	78	8	282,439,500.00	100	1,548.9 4
	Tersedianya dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	5.04.01.1.01.02 :Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	dok	3	24,203,500.00	3	66,902,700	3	27,757,700.00	100	41	7	85,947,100.00	233	355.10

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	Tersedianya dokumen Perubahan RKAP-SKPD	5.04.01.1.01.03: Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	dok	3	17,571,600.00	3	61,418,000	4	53,988,000.00	133	88	6	114,018,800.00	200	648.88
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.04.01.1.01.06 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	48	11,901,000.00	16	31,598,000	16	18,258,000.00	100	58	48	56,149,300.00	100	471.80
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.04.01.1.01.07 :Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	30	8,258,500.00	12	144,476,900	12	74,213,417.00	100	51	32	107,593,717.00	107	1,302.82
	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	5.04.01.1.02:Admini strasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	dok	57	10,509,657,288.00	19	13,957,522,001	19	12,684,319,836.00	100	91	57	36,874,661,213.00	100.00	350.86
				org	286		102		96		94		96		33.57	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	5.04.01.1.02.01 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	283	10,179,587,388.00	90	13,659,493,501	88	12,458,475,910.00	98	91	96	36,239,543,060.00	33.92	356.00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.04.01.1.02.02 :Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	dok	12	100,957,500.00	12	192,696,300	12	147,612,726.00	100	77	24	291,314,553.00	200.00	288.55

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
		Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN													
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.04.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3	207,950,400.00	1	57,335,000	1	38,020,000.00	100	66	3	238,070,200.00	100.00	114.48
	Tersedianya laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	54	21,162,000.00	18	47,997,200	18	40,211,200.00	100	84	54	105,733,400.00	100.00	499.64
	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	org	3	48,000,000.00	1	43,907,800	1	43,907,800.00	100	100	5	117,685,600.00	166.67	245.18
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.04.01.1.03.06 : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	48,000,000.00	1	43,907,800	1	43,907,800.00	100	100	5	117,685,600.00	125.00	245.18
	Terwujudnya pengelolaan	5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi	jenis	251	403,072,600.00	83	752,581,455	83	575,755,201.00	100	77	251	1,307,225,833.00	100.00	324.32

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	administrasi umum perkantoran		Umum Perkantoran	org	4,498		120		115		96		616		13.69	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.04.01.1.06.01 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	42,825,000.00	10	85,986,600	10	72,298,450.00	100	84	20	145,099,450.00	200.00	338.82
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5.04.01.1.06.02: Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	70	172,314,200.00	70	84,675,950	70	68,544,450.00	100	81	70	226,117,050.00	100.00	131.22
	Tersedianya bahan logistik kantor	5.04.01.1.06.04: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1,200	6,000,000.00	20	4,000,000	20	2,502,000.00	100	63	71	141,055,000.00	5.92	2,350.92
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	66,773,400.00	2	17,196,000	2	8,327,500.00	100	48	6	34,479,750.00	300.00	51.64
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	2	15,660,000.00	1	15,660,000	1	13,680,000.00	100	87	5	40,080,000.00	250.00	255.94
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.04.01.1.06.09: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	898	99,500,000.00	100	545,062,905	95	410,402,801.00	95	75	545	720,394,583.00	60.69	724.01
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	unit	180	69,747,800.00	24	276,149,000	22	231,628,000	92	84	64	297,678,000.00	35.56	426.79

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5.04.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	17	-	3	74,114,000	2	53,228,000	67	72	2	53,228,000.00	11.76	-
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	45	69,747,800	21	202,035,000	20	178,400,000	95	88	62	244,450,000.00	137.78	350.48
	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	%	100	2,046,746,700.00	100	2,292,227,524	66	1,990,811,245	66	87	243	5,651,097,830.00	243.39	276.10
	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	2	6,439,900	2	2,700,000	2	500,000.00	100	19	4	3,750,000.00	200.00	58.23
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	690,306,800	3	761,882,924	3	584,611,245.00	100	77	6	1,635,292,330.00	200	236.89
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	5.04.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1,350,000,000	12	1,527,644,600	12	1,405,700,000.00	100	92	24.00	4,012,055,500.00	200.00	297.19
	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur	5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	399	632,809,000.00	184	1,161,710,000	192	931,122,503	104	80	755	1,876,643,176.00	189	296.56
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	5.04.01.1.09.01 :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	unit	21	172,150,000.00	18	160,720,000	18	125,012,034.00	100	78	60.00	392,543,565.00	285.7	228.02

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	dinas atau kendaraan dinas jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Dibayarkan Pajaknya													
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	90,000,000.00	5	90,000,000	5	69,159,247.00	100	77	15.00	235,736,736.00	300	261.93
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	369	228,430,000.00	159	368,990,000	159	277,198,972.00	100	75	664.70	524,509,922.00	180.14	229.62
	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	142,229,000.00	2	542,000,000	10	459,752,250.00	500	85	15.00	723,852,953.00	375.00	508.93
	Meningkatnya ASN Bersertifikat Kompetensi Manajerial	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.10	51,655,240,040.43	0.10	3,048,398,300	0.09	2,432,827,428	93	80	0.09	11,687,756,150.00	87.24	22.63
	Meningkatnya ASN Bersertifikat Kompetensi Fungsional		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional		0.04		0.04		0.11		275		0.11		293.92	
	Meningkatnya ASN Bersertifikat Kompetensi Teknis		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Teknis		0.15		0.15		0.07		47		0.07		48.10	
	Meningkatnya Kompetensi ASN melalui Uji Sertifikasi Kompetensi		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi		0.62		0.62		0.002		0.32		0.002		0.32	
	Terwujudnya peningkatan	Pengembangan Kompetensi Tekhnis	Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	org	630	3,017,260,626.63	200	449,847,200	110	295,093,584	55	66	497.00	853,434,879.00	78.89	28.29

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
			Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis		9		11		10		91					
	Pengembangan Kompetensi Teknis															
	Tersusunnya kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum	5.04.02.1.01 .01:' Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	248,451,557.00	4	91,566,800	4	86,265,724.00	100	94	6.00	218,023,234.00	200.00	87.75
	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dok	3	188,076,443.21	4	31,994,300	4	30,244,300.00	100	95	6.00	55,096,900.00	200.00	29.29

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN/RINCI AN OUTPUT	Sat uan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
			Pemerintahan Umum yang Disusun													
	Terselenggaranya Pengembangann Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5.04.02.1.01.03 :Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	org	630	2,178,461,048	200	301,286,100	110	153,982,300.00	55	51	497. 00	456,975,250.00	78.8 9	20.98
	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	5.04.02.1.01.04 'Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dok	3	402,271,578.44	3	25,000,000	2	24,601,260.00	66.6 7	98	3.00	123,339,495.00	100. 00	30.66

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	Urusan Pemerintahan Umum	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
	Terwujudnya peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	org	1,291	48,637,979,414	88	2,598,551,100	88	2,137,733,844	100	82	708	10,834,321,271.00	54.86	22.28
			Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	org	480		60		-		-		133		27.71	
			Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	66		26		41		158		123		186.36	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	5.04.02.1.02.01 :Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3	132,057,742.68	2	25,000,000	2	-	100	-	12.00	2,007,400.00	400.00	1.52

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6	392,098,238.43	4	59,170,400	4	13,713,200.00	100	23	8.00	88,650,100.00	133.33	22.61
	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	org	480	671,037,778.38	60	131,916,100	-	79,924,220.00	-	61	133.00	220,263,575.00	27.71	32.82
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5.04.02.1.02.04 :Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	dok	9	1,542,322,945	4	747,654,600	6	528,789,353.00	150	71	10.00	1,207,770,141.00	111.11	78.31
	Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga	5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30	164,865,900.45	10	134,410,000	25	111,383,916.00	250	83	79.00	203,339,004.00	263.33	123.34
	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	dok	12	188,076,443.21	4	25,000,000	2	-	50	-	4.00	4,090,000.00	33.33	2.17

No	SASARAN	OPD/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target Akhir Renstra OPD Pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran renstra s/d Tahun dievaluasi (%)	
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	org	3864	45,427,613,780	88	1,345,400,000	88	1,282,712,535.00	100	95	708.00	8,890,423,831.00	18.32	19.57
	Terlaksananya Pembinaan, Penguatan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Penguatan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguatan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dok	12	119,906,584.77	2	130,000,000	2	121,210,620.00	100	93	10.00	217,777,220.00	83	181.62

✚ **Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja :**

- a. Meningkatkan koordinasi serta mengembangkan metode/inovasi terkait Pengembangan Kompetensi dengan Lembaga/ Kementerian/OPD di Provinsi NTB sehingga dapat memaksimalkan tuisi BPSDMD Provinsi NTB sebagai satu-satunya OPD yang memiliki tuisi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Memanfaatkan tuisi dan peran Widyaiswara dalam melaksanakan fungsi ke-diklat-an BPSDMD Provinsi NTB sebagai Lembaga Pemerintah yang telah terakreditasi dalam Pengembangan Kompetensi;
- c. Memanfaatkan portal SIMADU yang terintegrasi ke aplikasi SIASN, dimana portal SIMADU merupakan aplikasi data kepegawaian *online* yang dirancang khusus sehingga dapat menghitung Indeks Profesionalisme ASN secara kuantitatif;
- d. Meningkatnya jumlah tenaga pengembang atau tenaga pengajar yang berasal dari BPSDMD Provinsi NTB.

✚ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

- a. BPSDMD Provinsi NTB belum dapat mengakomodir semua pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi NTB karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi Satu Pintu dan Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Satu Pintu;
- b. Kurangnya koordinasi antar unit, disebabkan ketidaksediaan mekanisme koordinasi yang efektif antar unit dan departemen;
- c. Kurangnya responsibilitas terhadap kinerja dan anggaran, dikarenakan kurangnya budaya kerja yang menekankan tanggung jawab terhadap kinerja dan anggaran;
- d. Kesulitan dalam perolehan data mengenai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Luar BPSDM Daerah Provinsi NTB serta perolehan data mengenai jenis Diklat yang sudah diikuti oleh masing-masing ASN sehingga manfaat dari penggunaan aplikasi (SIMADU) belum dirasakan sepenuhnya;
- e. Belum adanya *awareness* (kesadaran) dari masing-masing ASN mengenai pentingnya Pengembangan Kompetensi (Bangkom) sehingga BPSDMD Provinsi NTB sulit untuk menentukan kegiatan Diklat/ Sosialisasi yang efektif untuk diimplementasikan.
- f. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Level Tinggi.

✚ **Langkah/solusi yang diambil BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk mengantisipasi kegagalan atas realisasi capaian kegiatan pada Tahun 2024 agar tidak terulang pada Tahun 2025 antara lain :**

- a. Membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam lingkup internal BPSDMD Provinsi NTB melalui pertemuan rutin atau

- penggunaan platform kolaboratif terkait penentuan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang dapat dilaksanakan di lingkungan BPSDMD Provinsi NTB;
- b. Meningkatkan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pola – pola kerjasama, sharing anggaran dan daring untuk meminimalisir biaya pelaksanaan;
 - c. Melakukan sosialisasi/ monitoring pendampingan penginputan Data Sertifikasi Kompetensi di Portal SIMADU yang terintegrasi dengan aplikasi SIASN terhadap para guru di kabupaten / kota. Adapun kegiatan Sosialisasi / Monitoring pendampingan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam periode maksimal 6 (enam) bulan sekali oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB;
 - d. Mengirim pegawai dengan spesifikasi pekerjaan yang sesuai untuk mengikuti pelatihan di luar BPSDM Daerah Provinsi NTB terkait dengan kesempatan untuk pengembangan diri dan organisasi, serta pengaturan distribusi tugas yang efisien;
 - e. Menjalankan kembali Tim Pengembangan Kompetensi Satu Pintu yang pernah terbentuk pada Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB;
 - f. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di Lingkup BPSDMD Provinsi NTB agar pelaksanaan pengembangan kompetensi lebih maksimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan BPSDM Daerah Provinsi NTB dapat dilihat melalui pengukuran kinerja Pelayanan PD secara umum. Dimana kinerja pelayanannya berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Pengembangan Kompetensi yang diimplementasikan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi ASN,
2. Pengembangan Kompetensi yang diimplementasikan dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah dan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota,
3. Rapat Koordinasi Teknis Aparatur,
4. Pengembangan Kurikulum Modul Diklat,
5. Analisis terhadap kebutuhan Diklat,
6. Pengembangan Kompetensi tenaga pengembang seperti Widyaiswara, Struktural dan Fungsional Lingkup BPSDM Daerah Provinsi NTB,
7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan BPSDM, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Pendukung,
8. Pengembangan kompetensi ASN melalui Pengkajian dan Evaluasi pasca pengembangan kompetensi.

Untuk Tahun Anggaran 2025, BPSDMD Provinsi NTB berusaha melakukan pembenahan efektifitas sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen

perencanaan, dengan memperhatikan kekurangan serta kelemahan dari realisasi pencapaian sasaran dan kegiatan pada Tahun sebelumnya (2024) sehingga setiap bidang dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dari BPSDM Daerah Provinsi NTB.

Terdapat 2 (Dua) program yang diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Program Prioritas dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, serta 9 Kegiatan dan 33 Sub- Kegiatan. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, BPSDMD Provinsi NTB merencanakan beberapa jenis kegiatan Pengembangan Kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) dengan sasaran peserta sebanyak 10 orang untuk Tingkat Provinsi, PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dengan sasaran peserta sebanyak 124 orang (44 orang peserta dari Tingkat Provinsi dan 80 orang peserta dari Kabupaten/Kota), serta PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) dengan sasaran peserta sebanyak 84 orang (44 orang peserta dari Tingkat Provinsi dan 40 orang peserta dari Kabupaten/ Kota). Adapun ketiga jenis kegiatan Pelatihan Level Kepemimpinan Tinggi diatas dilakukan dengan metode *Blended Learning*.
2. BPSDM Daerah Provinsi NTB juga akan melaksanakan kegiatan Latsar untuk Calon Pegawai Negeri Sipil penempatan Pemerintah Provinsi dengan sasasan peserta sebanyak 20 orang serta Orientasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan metode *Blended Learning*. Adapun mengenai Orientasi PPPK ini diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Orientasi bagi PPPK sebanyak 1 (satu) kali sepanjang berstatus sebagai PPPK. Untuk Tahun Anggaran 2025, BPSDM Daerah Provinsi NTB menargetkan akan melakukan Orientasi terhadap 600 orang Pegawai PPPK dari total 6738 orang pegawai yang berasal dari Tahun Pengangkatan 2023 serta Tahun Pengangkatan 2024.
3. Bimtek / Workshop untuk Fungsional tertentu, dengan metode pelaksanaan *Full Daring* sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini pembiayaan dilakukan terhadap Narasumber dari Instansi Pembina dan transport koordinasi dengan Instansi Pembina. Adapun total peserta dalam kegiatan ini adalah sejumlah 175 orang peserta dengan perincian : 110 orang Analis Kebijakan, 24 orang Analis SDM, dan 41 orang Arsiparis. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan diselenggarakan di BPSDM Daerah Provinsi NTB maupun di pusat (LAN-RI dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Jakarta). Adapun kendala yang masih berusaha untuk dikendalikan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB terkait pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, karena beberapa kriteria fasilitas yang dipersyaratkan oleh LAN-RI belum tersedia di BPSDM Daerah Provinsi NTB. Namun mengenai hal ini BPSDM Daerah Provinsi NTB berusaha untuk terus melakukan koordinasi dengan LAN-RI serta Kementerian terkait.
4. Terkait pelaksanaan Bangkom Bidang Teknis, BPSDM Daerah Provinsi NTB melaksanakan beberapa kegiatan Diklat untuk mengejar pencapaian target Indikator

- Kinerja Utama PD, antara lain : Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang, Diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B & C dengan masing-masing sasaran peserta sebanyak 30 orang, Diklat Barang Milik Daerah (BMD) dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang serta Diklat Arsiparis dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring banyak peserta dari Lingkup Pemerintah Provinsi NTB sehingga dapat menjadi kegiatan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis yang diselenggarakan di BPSDM Daerah Provinsi NTB maupun di pusat (LAN-RI dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Jakarta).
5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Manajerial & Teknis Kabupaten / Kota, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelatihan Manajerial & Teknis Provinsi, Perjanjian Kerjasama dan Monitoring serta Program Beasiswa *Cost Sharing* yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan BAPPENAS. Adapun Program Beasiswa *Cost Sharing* memasuki pelaksanaan kedua pada Tahun Anggaran 2025 dengan metode perkuliahan *Full Daring*.
 6. Dalam hal pemenuhan Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Peningkatan Tenaga Pengembang Kompetensi (TPK), BPSDM Daerah Provinsi NTB menargetkan untuk memperoleh 15 (lima belas) Dokumen dan 100 orang Peserta (terdiri atas Widyaiswara, Manajemen dan Pelaksana) dengan perincian : Re-Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan target 1 Dokumen, Penjaminan Mutu Pelatihan dengan target 7 Dokumen, Roadmap Bangkom dan Serkom dengan target 1 Dokumen, Corpu (*Corporate University*) dengan target 1 Dokumen serta BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan target 5 (lima) Dokumen. Kemudian, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan Peningkatan Tenaga Pengembang Kompetensi yaitu : Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara ; lalu Uji Kompetensi sebagai pemenuhan syarat Peningkatan TPK dengan sasaran peserta sebanyak 5 (lima) orang peserta. Kemudian diklat TOT (*Training of Trainer*) dengan sasaran sebanyak 30 orang dari Jabatan Widyaiswara, diklat MOT (*Management of Training*) dengan sasaran sebanyak 21 orang dari Jabatan Manajemen, serta diklat TOC (*Training Officer Course*) dengan sasaran sebanyak 30 orang dari Jabatan Pelaksana.
 7. Selain kegiatan diatas, BPSDM Daerah Provinsi NTB juga akan melaksanakan Kegiatan Uji Kompetensi terhadap Jabatan Fungsional dan Non-Jabatan Fungsional dengan total sasaran peserta sebanyak 275 orang. Adapun jenis Jabatan Fungsional yang akan diujikan yaitu Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan seperti Perawat, Perawat Gigi, Rekam Medis, Radiografer dan Fisioterapis; kemudian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan KEMENDAGRI yang akan diujikan terhadap Jabatan Fungsional POL PP dan P2UPD dengan masing-masing jumlah sasaran sebanyak 30 orang peserta serta pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 (Pengadaan Barang dan Jasa) untuk Non-Jabatan Fungsional dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang.

8. Dalam Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat beberapa kegiatan yang menunjang operasional antara lain adalah ke-Sekretariat-an: Pembayaran Air, Listrik dan Internet, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang mencakup Pemeliharaan Alat Kantor, Pemeliharaan Jaringan Listrik, Pemeliharaan Jaringan Internet, dan Pemeliharaan Kendaraan, Pengadaan Barang & Jasa, Gaji Tenaga Kontrak, TPP, Gaji ASN (PNS dan PPPK) serta Perjalanan Dinas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam menghadapi Tantangan Global Birokrasi, BPSDM Daerah Provinsi NTB masih mempunyai permasalahan yang belum dapat diselesaikan dari tahun sebelumnya sehingga memiliki dampak jangka panjang terhadap tugas pokok dan fungsi Lembaga. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Dalam menganalisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi, perlu dilakukan penyusunan AKPK (Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi), dimana AKPK merupakan salah satu metode dalam menggali kebutuhan pengembangan kompetensi untuk pegawai. Kompetensi sumber daya manusia yang tangguh, professional dan berintegritas tinggi adalah hal yang paling dibutuhkan ASN dalam menghadapi Era *VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexcity, Ambiguity)* dan era Industri 4.0. Dampak dari belum tersusunnya AKPK di lingkup BPSDM Daerah Provinsi NTB adalah pemetaan jabatan yang masih belum memenuhi standar kebutuhan organisasi sehingga sulit untuk menentukan program-program kegiatan Pengembangan Kompetensi untuk pegawai. Selama ini, BPSDM Daerah Provinsi NTB cenderung lebih fokus dalam menyelenggarakan Diklat untuk pihak eksternal, sedangkan belum semua pegawai di lingkup BPSDM Daerah Provinsi mendapatkan kesempatan untuk Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan tupoksi-nya sehingga hal inilah yang menyebabkan BPSDM Daerah Provinsi mengangkat 'Rendahnya Presentase Kompetensi ASN' sebagai Isu Strategis dalam Tahun Anggaran 2025.
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi tidak berdampak secara signifikan pada jenjang karir ASN sehingga menyebabkan timbul persepsi negatif dari Stakeholder dan ASN itu sendiri. Persepsi negatif ini dapat berimplikasi pada banyak hal, antara lain sikap abai dalam melakukan penginputan Portal SIMADU, yang dalam proses-nya diharapkan dapat membuat pegawai lebih peduli terhadap karir kepegawaiannya dengan cara melakukan pembaharuan data secara kontinyu terhadap sertifikasi kompetensi yang telah diikuti. Selain itu, persepsi negatif juga berimplikasi pada pemilihan peserta Bangkom yang tidak mengacu pada kompetensi terhadap tupoksi masing-masing. Pemilihan peserta Bangkom dilakukan hanya pada segelintir pegawai sehingga pegawai yang seharusnya lebih berhak untuk mendapatkannya tidak berkesempatan untuk mendapatkan Bangkom yang dapat

meningkatkan kapasitas dan kompetensinya untuk kinerja organisasi. Sementara itu, pegawai yang dikirim untuk mengikuti Bangkom cenderung melakukannya hanya untuk memenuhi perintah sehingga tidak berkontribusi apapun dalam peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan tupoksinya. Hal ini juga menjadi poin penting bagi BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk merangkum isu strategis dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi, namun pada kenyataannya di Provinsi NTB belum semua ASN memahami tupoksi nya masing-masing serta belum memiliki *awareness* (kesadaran) untuk memaksimalkan kapasitas dan kompetensinya demi kinerja organisasi.

3. Sebagai salah satu PD yang memiliki sumber PAD, BPSDM Daerah Provinsi NTB melakukan pungutan retribusi melalui penyewaan wisma dan aula meskipun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai tuisi utama BPSDM Daerah Provinsi NTB sehingga berdasarkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2024 Pasal 78, BPSDMD Daerah Provinsi NTB dapat menggunakan maksimal 50% dari target realisasi PAD untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Jika dilihat dari sisi sarana dan prasarana yang tersedia di BPSDM Daerah Provinsi NTB saat ini dinilai belum cukup memadai terutama untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Tinggi, selain itu penjadwalan pemeliharaan sarana dan prasarana belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh sehingga ada beberapa fasilitas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk kedepannya, diharapkan dengan terbitnya Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2024, pemeliharaan sarana dan prasarana dapat lebih digiatkan kembali dengan adanya penambahan anggaran dari 50% target realisasi PAD, sehingga fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB dapat dimaksimalkan menjadi potensi PAD terhadap Lembaga/Kementerian terkait maupun pihak eksternal.
4. Dalam pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi adalah Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Workshop/Seminar/Bimtek dan lain sebagainya yang sejenis. Hanya saja untuk pelaksanaan Workshop/Seminar/Bimtek dan lain sebagainya yang sejenis diluar BPSDMD Provinsi NTB belum dapat tercatat dengan baik oleh BPSDMD Provinsi NTB sebagai *Leading Sector* Pengembangan Kompetensi di Provinsi NTB, sehingga pencapaian IPA Dimensi Kompetensi masih Rendah. Untuk itu BPSDMD Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harapan dapat menaikkan nilai terhadap Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi NTB dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ter Integrasi Satu Pintu, yaitu BPSDMD Provinsi NTB mempunyai kewenangan terhadap pencatatan terhadap seluruh jenis Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan didalam ataupun diluar BPSDMD Provinsi NTB, dengan cara membangun Database Pengembangan Kompetensi ASN serta Perangkat Daerah

lainnya mengajukan Registrasi kepada BPSDMD Provinsi NTB untuk melakukan Pengembangan Kompetensi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dalam hal ini data yang tersedia sebagai bahan pembanding adalah DPA tahun 2024 dan data pada Renstra Tahun 2024 – 2026. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					26,406,377,566
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD		Sekretariat	100	19,676,230,566
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	Sekretariat	36	440,229,530
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Sekretariat	2	191,029,450
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Sekretariat	1	64,191,950
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Sekretariat	1	35,294,000
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Sekretariat	26	24,389,000
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Sekretariat	6	125,324,950
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Sekretariat/Subbagian Keuangan	100	15,260,585,061

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Subbagian Keuangan	95	15,030,801,061
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Subbagian Keuangan	12	159,470,000
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Subbagian Keuangan	1	40,675,000
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	Subbagian Keuangan	18	29,639,000
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	Sekretariat/Subbagian Umum dan Kepegawaian	100	47,911,375
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	4	47,911,375
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	Sekretariat/Subbagian Umum dan Kepegawaian	100	459,556,365
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Subbagian Umum dan Kepegawaian	10	71,639,225
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Subbagian Umum dan Kepegawaian	70	58,257,140
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	4,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Subbagian Umum dan Kepegawaian	2	10,000,000
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Subbagian Umum dan Kepegawaian	2	15,660,000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Subbagian Program	50	300,000,000
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	Sekretariat / Subbagian Umum dan Kepegawaian	23	485,000,000
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	35,000,000
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	50,000,000
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	20	200,000,000
5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	200,000,000
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Sekretariat / Subbagian Umum dan Kepegawaian	100	2,097,334,834
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	2	1,500,000
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	12	591,722,034
5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Subbagian Umum dan Kepegawaian	12	1,504,112,800

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	Sekretariat/Subbagian Umum dan Kepegawaian	529	835,613,581
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	21	153,100,000
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	6	90,000,000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	500	200,000,000
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Subbagian Umum dan Kepegawaian	2	392,513,581
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Point	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0,10	6,730,147,000
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0,02	
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Teknis		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	0,18	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Tekhnis		orang	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	150	828,701,790
			dokumen		15	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.01 .01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis/ Subbidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	5	147,691,295
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis /Subbidang Penyusunan Standar Kompetensi	5	114,746,295
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		150	491,264,200

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen	Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama / Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Teknis	5	75,000,000
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	Orang	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	75	5,901,445,210
		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	Orang	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	226	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Dokumen	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, 2. Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama	22	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi.	Dokumen	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional /Subbidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Pengelolaa n Kelembagaan	1	120,000,000
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaa n Kelembagaan/ Subbidang Pengelolaa n LembagaS ertifikasi Profesi (LSP)	2	117,600,000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaa n Kelembagaan /Subbidang sertifikasi kompetensi	120	341,055,210
5.04.02.1.02.04	:Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaa n Kelembagaan /Subbidang Pengelolaa n Kelembagaan dan Tenaga Pengemba ngan Kompetensi	3	509,650,000

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025						
KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Bidang Evaluasi dan Pelaporan/ Subbidang Kerjasama Antar Lembaga	10	450,000,000
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan/ Subbidang Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	1	30,000,000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Orang	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional/ Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	226	4,258,140,000
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.	Dokumen	Bidang Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama/ Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5	75,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada pelaksanaan Renja BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa usulan program maupun kegiatan yang dijamin dari berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. BPSDM Daerah Provinsi NTB berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab-nya sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menjalankan fungsi Pendidikan dan Pelatihan, dan pemenuhan pelatihan pada perangkat daerah teknis menjadi salah satu fokus usulan program di Tahun Anggaran 2025. Selain itu, BPSDM Daerah Provinsi NTB juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir kegiatan Diklat dan Pelatihan sesuai dengan target kinerja dari masing-masing bidang dalam BPSDM Daerah Provinsi NTB.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan untuk pencapaian kinerja pada BPSDM Daerah Provinsi NTB disusun berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun usulan yang diajukan BPSDM Daerah Provinsi NTB adalah perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Perubahan SOTK tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana BPSDM Daerah Provinsi NTB memandang perlu untuk mengusulkan perubahan dikarenakan ada satu bidang yaitu bidang Evapol (Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama) yang dinilai tidak linear untuk mendukung kinerja Eselon II. Hal tersebut disebabkan diantara 4 (empat) bidang yang dibawah oleh Eselon II (Kepala Badan) BPSDM Daerah Provinsi NTB yaitu Bidang PKM (Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional), Bidang PKT (Pengembangan Kompetensi Teknis), SKPK (Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan) dan Evapol (Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama); indikator sasaran bidang Evapol adalah berupa Dokumen sehingga tidak mendukung langsung kinerja dari Eselon II. Mengenai hal ini, BPSDM Daerah Provinsi NTB memutuskan untuk mengambil langkah penting kedepannya yaitu melebur bidang Evapol dan memaksimalkan fungsi Kelembagaan pada Bidang SKPK sehingga Bidang SKPK dapat menjalankan sekaligus beberapa fungsi yaitu Evaluasi, Penjamin Mutu, Akreditasi Kegiatan serta Akreditasi Kelembagaan.

Tabel 2.5.1 Usulan SOTK BPSDM Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan PerGub NTB Nomor 9 Tahun 2023	Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 89 Tahun 2021
I. Kepala Badan II. Sekretaris Badan III.1. Kepala Sub Bagian Keuangan III.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian IV.1. Bidang SKPK (Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan) IV.2. Bidang PKM (Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional) IV.3. Bidang PKT (Pengembangan Kompetensi Teknis) IV.4. Bidang Evapol (Evaluasi Pelaporan dan Kerjasama)	I. Kepala Badan II. Sekretaris Badan III.1. Kepala Sub Bagian Keuangan III.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian IV.1. Bidang Kelembagaan IV.2. Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional IV.3. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial IV.4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun kebijakan - kebijakan nasional yang dijadikan pedoman/acuan oleh BPSDM Daerah Provinsi NTB dalam pelaksanaan program/kegiatannya antara lain :

I. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

BPSDM Daerah Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan bentuk Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana hal tersebut sebagai komponen yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kerja. Disamping itu pengembangan kompetensi merupakan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan pola karier sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Dan ayat 2 disebutkan bahwa “Pengembangan Kompetensi yang disebutkan pada ayat (1) antara lain melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar, Kursus dan Workshop”

II. Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara

Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan guna pengembangan kompetensi, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara;

III. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Tugas Pokok sebagai Lembaga Pengembangan Kompetensi ASN dengan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang meliputi :

- a. Menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
- b. Melaksanakan pengembangan kompetensi;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi ASN ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan dalam Pasal 203 ayat :

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (3) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun
- (4a) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*), di mana *Corporate University (CorpU)* dimaksud sebagai entitas pendidikan yang merupakan alat strategis yang dirancang untuk mencapai misi yang ingin dicapai. Caranya adalah dengan melakukan kegiatan yang mengembangkan pembelajaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan organisasi dan individu.

IV. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 8 Tahun 2019

BPSDM Daerah Provinsi NTB masuk kedalam Misi ke II NTB Bersih dan Melayani dengan Program Unggulan Manajemen Talenta dan Agen Perubahan. Dalam mencapai Target Manajemen Talenta, Indikator BPSDMD Provinsi NTB adalah Tata cara perhitungan pencapaian IPA (Indeks Profesionalisme ASN)

Dimensi Kompetensi. Indeks Profesionalisme ASN diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IPA terbagi dalam :

1. Dimensi Kompetensi berkontribusi 40%
2. Dimensi Kinerja berkontribusi 30%
3. Dimensi Kualifikasi berkontribusi 25%
4. Dimensi Disiplin berkontribusi 5%

Pencapaian Dimensi Kompetensi dilakukan dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN melalui pelatihan kediklatan di BPSDM Daerah Provinsi NTB (Klasikal) dan pengembangan kompetensi Non Klasikal seperti Coaching, Mentoring, Koordinasi dan lain sebagainya.

V. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah “Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara.
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi dan peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada LAN diketahui bahwa program dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur pada BPSDM Daerah Provinsi NTB, mempedomani Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Aparatur Negara sesuai dengan Peraturan yang dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPSDMD Provinsi NTB

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satu upaya penting yang harus dilakukan secara terus menerus adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan untuk menciptakan SDM Aparatur yang berperan berkompeten sehingga dalam hal ini penetapan tujuan dan sasaran

merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Namun pada Tahun 2025 penetapan visi Kepala Daerah sudah tidak ada digantikan dengan penetapan tujuan pada perangkat daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan Fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome.

Dalam Tabel dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan Dan Sasaran BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya ASN yang memiliki Kompetensi	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi	26,72%	Jumlah Persentase Hasil per Jenis Pengembangan Kompetensi ASN

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, BPSDM Daerah Provinsi NTB mendefenisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode.

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019, BPSDM Daerah Provinsi NTB memiliki 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pengembangan Kompetensi Teknis

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
- b. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- e. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga

- f. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
- g. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- h. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.0.00.0.00.01.0 000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					27,029,894,061				20,675,511,680
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD			100	19,153,282,095			100	17,389,047,089
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		36	440,229,350			36	263,000,000
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		2	191,029,450	DAU BEBAS		2	122,000,000
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen		1	64,191,950	DAU BEBAS		1	55,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen		1	35,294,000	DAU BEBAS		1	54,000,000
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		26	24,389,000	DAU BEBAS		26	11,000,000
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	125,324,950	DAU BEBAS	25,	6	21,000,000
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		100	15,292,520,061	PAD		100	13,789,000,000
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		88	15,062,736,061	DAU BEBAS DAN PAD		115	13,604,000,000
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	159,470,000	DAU BEBAS		12	135,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kkeuangan Akir Tahun SKPD	Laporan		1	40,675,000	DAU BEBAS		1	30,000,000
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Laporan		18	29,639,000	DAU BEBAS		18	20,000,000
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen		100	43,105,000			100	45,000,000
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		4	43,105,000	DAU BEBAS		4	45,000,000
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Pesen		100	401,806,365			100	437,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		10	71,639,225	DBH BEBAS		10	80,000,000
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		70	58,257,140	DBH BEBAS		70	75,000,000
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	4,000,000	DBH BEBAS		1	4,000,000
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	10,000,000	DBH BEBAS		2	15,000,000
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2	15,660,000	DBH BEBAS		2	14,000,000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		45	242,250,000	DAU BEBAS DAN DBH BEBAS		50	249,000,000
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit		26	200,111,000			27	138,365,965

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	55,000	DBH BEBAS		1	55,000
5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	25,000,000	DBH BEBAS		5	20,000,000
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		23	175,000,000	DBH BEBAS		20	68,310,965
5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	55,000	DBH BEBAS		1	50,000,000
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	1,950,836,319			100	1,927,581,124
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		2	1,500,000	DAU BEBAS		2	2,700,000
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	632,132,219	DAU BEBAS		12	348,677,324

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	1,317,204,000	PAD		12	1,576,203,800
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit		159	774,675,000			139	664,100,000
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		21	160,720,000	DBH BEBAS		20	153,100,000
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6	90.000.000	DBH BEBAS		6	90,000,000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		129	242,010,000	DBH BEBAS		110	156,000,000
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	281,945,000	DBH BEBAS		3	265,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	Point		0.00	7,876,611,966			0.00	3,286,464,591
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional								
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis								
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Tekhnis		orang		90	538,722,930			120	452,880,000
			dokumen		9				5	
5.04.02.1.01 .01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen		3	103,079,045	DBH BEBAS		1	45,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dokumen		3	83,934,185	DBH BEBAS		1	41,000,000
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		90	280,709,600	DBH BEBAS		120	366,880,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATA N	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi.	Dokumen		3	71,000,100	DBH BEBAS		3	25,000,000
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang		75	7,337,889,036			75	2,833,584,591
		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	Orang		1,113				618	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	Dokume n		51				33	

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembang Kompetensi.	Dokumen		10	175,000,000	DBH BEBAS		2	25,000,000
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen		3	59,170,400	DBH BEBAS		3	55,000,000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi yang Tersertifikasi	Orang		250	229,450,000	DBH BEBAS		200	122,613,746
5.04.02.1.02.04	:Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan		6	280,386,736	DBH BEBAS		10	300,000,000

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen		15	337,034,100	DBH BEBAS		10	70,000,000
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatn Fungsional yang Disusun	Dokumen		7	34,000,000	DBH BEBAS		5	25,000,000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Orang		1113	6,150,882,000	PAD, DBH BEBAS		618	2,150,970,845, 00

KODE REKENING	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT		RENCANA TAHUN 2025				NAMA KEGIATA N	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Jabatan.	Dokumen		10	71,965,800	DBH BEBAS		3	85,000,000

BAB V

PENUTUP

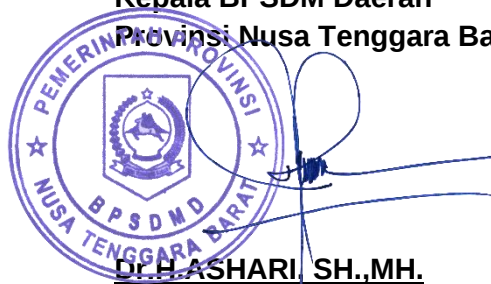
Renja Organisasi Perangkat Daerah **BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD dan RPJMD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan manajemen dan seluruh staf **BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat** sehingga akan diperoleh peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Mataram, September 2024

**Kepala BPSDM Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



Dr. H. ASHARI, SH.,MH.

NIP. 19661231 198603 1 105